

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh Peneliti mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017-2019, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perkembangan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah belum mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan Pemerintah belum matang dalam melakukan perencanaan program dan proyek pemerintah, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan belum dapat terlaksana dengan baik.
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu berdasarkan Analisis rasio adalah sebagai berikut :
 - 2.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang, karena masih berada dalam skala interval 00,00-10,00.
 - 2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif, karena masih berada dalam interval 0%-25%.

- 2.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD dapat dikategorikan sudah efektif karena berada pada interval 90%-100
- 2.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikategorikan cukup efisien karena berada pada interval 80%-90%.
- 2.5 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dari aspek pertumbuhan pendapatan dikategorikan baik dan rasio pertumbuhan PAD memerlukan perhatian yang lebih dikarenakan pada tahun 2018 dan 2019 terus terjadi penurunan atau kemerosotan pertumbuhan dikarenakan PAD tahun tersebut tergolong kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Belu sudah mampu untuk mempertahankan rasio pertumbuhan belanja. Secara teori dengan penurunan ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Belu sudah mampu menekan pengeluaran daerah.
- 2.6 Sebagian besar dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belu masih diprioritaskan untuk kebutuhan Belanja Operasi sehingga Belanja Modal relatif kecil. Hal ini dapat dilihat dari persentase belanja operasi yang lebih besar dibandingkan dengan persentase belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya Dinas-Dinas Otonomi dan Belanja Pegawai untuk gaji PNS.

6.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belu

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Belu harus lebih memperhatikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali potensi-potensi yang baru dan mengembangkan potensi-potensi yang ada sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat.
2. Meningkatkan kinerja keuangan yang baik dengan memperhatikan rasio keserasian belanja modal yang masih kurang tidak mendapat perhatian.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Belu harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan referensi ini untuk penelitian selanjutnya dengan menambah variabel dan diharapkan untuk lebih mendalam meneliti mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan menggunakan lebih banyak rasio sehingga penelitiannya bisa lebih andal dan akurat daripada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al. Haryono, Jusup. 2005. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Edisi Enam. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Baridwan, Zaki. 2009. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Yogyakarta: BPFPE.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFPE.
- Darise, N. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks
- Epivani, Rima Villanova. 2015. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul Periode 2009-2012*. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Tiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Istyaningtias, Dian. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Tengah Tahun 2010-2014*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Keban, Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep Teori Dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: STIE YAKPN.
- Mamesa, DJ. 2005. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu,DR. 2005. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Peraturan Pemerintah Pasal 4 Nomor. 105 Tahun 2000. tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 58. Tahun 2005. tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006. tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan*.

Pramono, Joko. 2014. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Surakarta)*. Among Makarti, Volume 7 (13).

Rulin. “*Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara*”. 11 Februari 2014. <https://repository.ung.ac.id>

Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2004. tentang *Keuangan Negara*.

Keban, Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep Teori Dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: STIE YAKPN.

Mamesa, DJ. 2005. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu,DR. 2005. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Peraturan Pemerintah Pasal 4 Nomor. 105 Tahun 2000. tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 58. Tahun 2005. tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006. tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan*.

Pramono, Joko. 2014. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Surakarta)*. Among Makarti, Volume 7 (13).

Rulin. “*Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara*”. 11 Februari 2014. <https://repository.ung.ac.id>

Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2004. tentang *Keuangan Negara*.